

RENCANA KERJA

BKPSDM KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2021



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Cigugur - Parigi Telp./Fax. (0265) 2641015
Pangandaran

Kode Pos 46393

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 900/Kpts. 530/BKPSDM/2020

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. Bahwa Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaannya yang didasarkan pada Rencana Kerja.
- b. Bahwa Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 67), maka untuk mengimplementasikan sebagaimana huruf a perlu disusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2021 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
31. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
32. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 62).
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah;
2. Kepala BKPSDM adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin BKPSDM;
3. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2021, yang selanjutnya disebut RENJA BKPSDM adalah dokumen perencanaan SKPD untuk Tahun 2021.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA KERJA

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 terdiri dari:

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
 - 1.4.1 Pokok Bahasan
 - 1.4.2 Isi Dokumen
- BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM
- BAB V Penutup

BAB III
ISI DAN URAIAN RENCANA KERJA
Pasal 3

Isi beserta uraian Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahunan BKPSDM dan menjadi tolok ukur pertanggungjawaban kinerja tahunan yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) BKPSDM Kabupaten Pangandaran

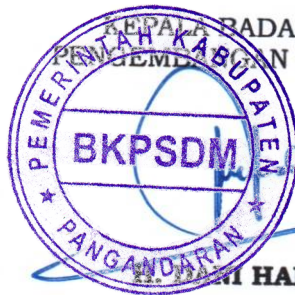
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran Tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 maka Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala BKPSDM ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BKPSDM.

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 28 Agustus 2020

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN' at the top and 'KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BKPSDM' at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, there is a signature in blue ink that appears to be 'fa'.

HAMDANI, S.Sos., MM



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Cigugur - Parigi Telp./Fax. (0265) 2641015
Pangandaran

Kode Pos 46393

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 900/Kpts. 530.1/BKPSDM/2020
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021;
- b. Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010, tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
4. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
5. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Memperhatikan : Rapat Koordinasi Penyusunan RKPD Tahun 2021 dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Lampiran Keputusan Kepala BKPSDM ini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021**

- | | |
|---------------------|--|
| I. PENANGGUNG JAWAB | : Kepala BKPSDM |
| II. KETUA | : Sekretaris BKPSDM |
| III. SEKRETARIS | : Kasubag Program dan Keuangan |
| IV. ANGGOTA | : <ol style="list-style-type: none">1. KABID Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan Informasi2. KABID Mutasi, Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja Aparatur3. Kasubag Umum dan Kepegawaian4. Kasubid Mutasi5. Kasubid Pengembangan Karir6. Kasubid Disiplin dan Penilaian Kinerja7. Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian8. Kasubid Pengembangan Kompetensi Aparatur9. Kasubid Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN10. Staf Subag Program dan Keuangan11. Operator Subag Program dan Keuangan |

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

NI HAMDANI, S.Sos., MM

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada Tanggal : 27 Agustus 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



HAMDANI, S.Sos., MM

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pangandaran;
2. Inspektur Kabupaten Pangandaran;

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan berkat dan karuniaNYA sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, prioritas daerah, masalah yang dihadapi, usulan program dan kegiatan yang berasal dari Sekretariat, Bidang Mutasi, Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja Aparatur, serta Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan Informasi yang ada dilingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2021.

Parigi, 28 Agustus 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



HANI HAMDANI, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19650417 199003 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 7

 1.4 Sistematika Penulisan 7

 1.4.1 Pokok Bahasan 7

 1.4.2 Isi Dokumen 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 10

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 10

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 21

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 22

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 27

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 27

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 29

 3.3 Program dan Kegiatan 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM 32

BAB V PENUTUP 36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi dan Capaian Renja SKPD Tahun Lalu 10

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian
 Renja s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan) 14

Tabel T-C.30 Target Capaian dan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja..... 22

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 23

Tabel 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 27

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2021 ...31



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai arti strategis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan pemerintah daerah.

Ada perubahan nomenklatur yang diberlakukan di tahun 2021 yaitu dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merubah/menyederhakan/mengganti program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2021.

Meskipun program dan kegiatan telah diseuaikan dengan nomenklatur yang terdapat di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pangandaran masih tetap berkaitan dengan pembangunan yang perlu dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam masa akhir RPJMD 2016 – 2021 dan Renstra Perubahan BKPSDM 2016 - 2021, adapun beberapa hal yang berkaitan dengan pembangunan yang perlu dilakukan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansil menterjemahkan visi, misi, satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran;
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk mengoptimalkan program melalui kegiatan sebagai dasar penetapan KUA dan PPAS;
3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD serta untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja satuan kerja perangkat daerah;
4. Renja merupakan dasar/acuan dalam melakukan evaluasi kinerja SKPD yang akan ditetapkan dalam LAKIP Tahun 2021.

Mengingat renja sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, maka sejak awal

tahapan penyusunan hingga penetapan Dokumen Renja SKPD harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik khususnya di bidang kepegawaian dan pembangunan daerah pada periode 1(satu) tahun kedepan, oleh karena itulah Renja 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mencerminkan :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam satu tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, juga merupakan evaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, bahwa Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 memperhatikan dan mengacu kepada:

- 1) Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;
- 2) Rencana dan Strategi Perangkat Daerah;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- 4) Solusi dari Permasalahan yang dihadapi; dan
- 5) Usulan program serta kegiatan yang berasal dari Sekretariat, Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier, serta Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan Informasi yang ada di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 memuat rencana program dan kegiatan selama satu tahun kedepan yang mengacu terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategi Perangkat Daerah yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 disusun dengan berpedoman dan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran

- Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
31. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
32. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 62).

34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 67);

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021 yang secara optimal dituangkan dalam DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah :

1. Untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun;
2. Untuk mengintegrasikan program/kegiatan yang ada pada Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

1.4.1 Pokok Bahasan

Secara garis besar pokok bahasan dalam Renja SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran adalah didasarkan pada urusan wajib yang dilakukan melalui :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- 2) Program Kepegawaian Daerah;
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.4.2 Isi Dokumen

Sistematika penyusunan laporan Renja SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen SKPD, Renstra SKPD, Renja K/L dan Renja Provinsi dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2019**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD**

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra SKPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap SKPD.

2.5. Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.**

Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan program dan kegiatan SKPD pada tahun rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana APBD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Menjelaskan kaidah pelaksanaan sesuai dengan Renja SKPD, penegasan komitmen SKPD terhadap pelaksanaan Renstra SKPD dan RPJMD, serta penegasan Renja SKPD sebagai acuan penyusunan RKA SKPD pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP



HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota. Adapun tiap urusan dijabarkan kembali dengan program dan kegiatan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Anggaran Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan dengan APBD sebesar Rp. 10.980.580.367,46,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.795.252.669,46,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.784.597.077,- atau 99,62% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.185.327.698,- yang terdiri dari 5 program dan 45 kegiatan dengan realisasi belanja sebesar Rp. 7.895.315.425,- atau 96,02%. Realisasi Belanja secara keseluruhan sebesar Rp. 10.643.912.502,- atau 96,93%. Gambaran lengkap dari pencapaian realisasi Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2019 tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

REALISASI ANGGARAN BKPSDM TAHUN 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	INDIKATOR KELUARAN/MA SUKAN/HASIL	SISA PAGU	SISA PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 441.977.260,00	Rp 432.972.160,00	97,96	Rp 9.005.100,00	2,04
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.998.000,00	Rp 1.998.000,00	100,00	Rp -	0,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 52.503.000,00	Rp 43.778.405,00	83,38	Rp 8.724.595,00	16,62
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 17.400.000,00	Rp 17.400.000,00	100,00	Rp -	0,00
4	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Rp 34.800.000,00	Rp 34.800.000,00	100,00	Rp -	0,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga	Rp 34.800.000,00	Rp 34.800.000,00	100,00	Rp -	0,00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 69.076.260,00	Rp 69.076.260,00	100,00	Rp -	0,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 30.000.000,00	Rp 29.834.850,00	99,45	Rp 165.150,00	0,55
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	100,00	Rp -	0,00
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	100,00	Rp -	0,00
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 19.700.000,00	Rp 19.700.000,00	100,00	Rp -	0,00
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 7.500.000,00	Rp 7.488.900,00	99,85	Rp 11.100,00	0,15
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 145.000.000,00	Rp 144.895.745,00	99,93	Rp 104.255,00	0,07
13	Penyedia Jasa Tenaga Pengemudi	Rp 22.200.000,00	Rp 22.200.000,00	100,00	Rp -	0,00

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	INDIKATOR KELUARAN/MA SUKAN/HASIL	SISA PAGU	SISA PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apa	Rp 224.789.000,00	Rp 217.838.030,00	96,91	Rp 6.950.970,00	3,09
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 12.100.000,00	Rp 12.100.000,00	100,00	Rp -	0,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 4.500.000,00	Rp 4.256.500,00	94,59	Rp 243.500,00	5,41
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 100.689.000,00	Rp 95.373.950,00	94,72	Rp 5.315.050,00	5,28
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 5.500.000,00	Rp 5.470.000,00	99,45	Rp 30.000,00	0,55
5	Pengadaan Komputer	Rp 47.000.000,00	Rp 45.637.580,00	97,10	Rp 1.362.420,00	2,90
6	Penyediaan Gedung Kantor	Rp 55.000.000,00	Rp 55.000.000,00	100,00	Rp -	0,00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 75.533.740,00	Rp 74.838.250,00	99,08	Rp 695.490,00	0,92
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Rp 4.200.000,00	Rp 3.998.900,00	95,21	Rp 201.100,00	4,79
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Rp 2.800.000,00	Rp 2.790.750,00	99,67	Rp 9.250,00	0,33
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 2.000.000,00	Rp 1.999.500,00	99,98	Rp 500,00	0,02
4	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Rp 25.433.740,00	Rp 25.333.000,00	99,60	Rp 100.740,00	0,40
5	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 20.800.000,00	Rp 20.596.600,00	99,02	Rp 203.400,00	0,98
6	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Rp 20.300.000,00	Rp 20.119.500,00	99,11	Rp 180.500,00	0,89
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp 2.703.889.000,00	Rp 2.407.564.037,00	89,04	Rp 296.324.963,00	10,96
1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Rp 708.500.000,00	Rp 627.451.830,00	88,56	Rp 81.048.170,00	11,44
2	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Rp 157.800.000,00	Rp 157.379.800,00	99,73	Rp 420.200,00	0,27
3	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Rp 7.700.000,00	Rp 6.113.000,00	79,39	Rp 1.587.000,00	20,61
4	Pembangunan/Pengembangan Sistem E-Remunerasi Kinerja	Rp 301.038.000,00	Rp 275.724.149,00	91,59	Rp 25.313.851,00	8,41
5	Penyusunan Formasi PNS	Rp 54.000.000,00	Rp 41.362.200,00	76,60	Rp 12.637.800,00	23,40
6	Pengadaan Pegawai	Rp 560.800.000,00	Rp 420.328.001,00	74,95	Rp 140.471.999,00	25,05
7	Pelantikan Jabatan	Rp 19.060.000,00	Rp 18.960.000,00	99,48	Rp 100.000,00	0,52
8	Pemindahan Tugas PNS	Rp 32.600.000,00	Rp 24.476.000,00	75,08	Rp 8.124.000,00	24,92
9	Pengelolaan Pensiun Pegawai	Rp 77.900.000,00	Rp 60.891.800,00	78,17	Rp 17.008.200,00	21,83
10	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Rp 90.800.000,00	Rp 87.657.657,00	96,54	Rp 3.142.343,00	3,46
11	Pengangkatan CPNS Ke PNS	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	100,00
12	Inventarisasi dan Fasilitas Data LHKASN	Rp 54.029.000,00	Rp 49.020.000,00	90,73	Rp 5.009.000,00	9,27
13	Pemberian Bantuan Belajar dan Ikatan Dinas	Rp 358.250.000,00	Rp 358.250.000,00	100,00	Rp -	0,00
14	Disiplin Pegawai	Rp 181.412.000,00	Rp 181.021.200,00	99,78	Rp 390.800,00	0,22
15	Penyusunan FS Pengembangan SDM Berbasis IT	Rp 100.000.000,00	Rp 98.928.400,00	98,93	Rp 1.071.600,00	1,07
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 4.739.138.698,00	Rp 4.726.102.948,00	99,72	Rp 13.035.750,00	0,28
1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Rp 4.127.354.000,00	Rp 4.127.193.450,00	100,00	Rp 160.550,00	0,00
2	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	Rp 65.800.000,00	Rp 60.059.800,00	91,28	Rp 5.740.200,00	8,72
3	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Rp 346.056.298,00	Rp 340.060.098,00	98,27	Rp 5.996.200,00	1,73
4	Pendidikan Penjurangan Struktural	Rp 169.940.000,00	Rp 169.300.200,00	99,62	Rp 639.800,00	0,38
5	Sertifikasi Kompetensi/Uji Kompetensi Pemerintahan	Rp 29.988.400,00	Rp 29.489.400,00	98,34	Rp 499.000,00	1,66
Jumlah		Rp 8.185.327.698,00	Rp 7.859.315.425,00	96,02	Rp 326.012.273,00	3,98
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN		Rp 2.795.252.669,46	Rp 2.784.597.077,00	99,62	Rp 10.655.592,46	0,38
JUMLAH TOTAL		Rp 10.980.580.367,46	Rp 10.643.912.502,00	96,93	Rp 336.667.865,46	3,07

Tabel 2.1 Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun Lalu (n-2)

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaan penyerapan anggaran kurang maksimal tapi tidak mempengaruhi target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, persentase penyerapan sebesar 83,38 % dengan target kinerja 2 rekening , meskipun ada sisa lebih anggaran tapi tidak mempengaruhi target kinerja;

2. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir , persentase penyerapan 88,56 % dengan target kinerja 2 dokumen meskipun ada efisiensi anggaran tetapi tidak mempengaruhi target kinerja;
3. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS, persentase penyerapan 79,39 %, dengan target kinerja 15 kasus terealisasi 11 kasus. Hal ini merupakan indikasi positif bahwa PNS berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin, baik pelanggaran ringan, sedang, maupun berat;
4. Penyusunan Formasi PNS, persentase penyerapan 76,60 % dengan target kinerja 1 dokumen, meskipun terdapat sisa lebih anggaran untuk diefisiensi tetapi tidak mempengaruhi target kinerja;
5. Pengadaan Pegawai, persentase penyerapan 74,95 % dengan target kinerja 350 orang tercapai 306 orang, terdapat sisa lebih anggaran yang akan digunakan untuk tahap ke II SKB yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, formasi kebutuhan pegawai telah terpenuhi;
6. Pemindahan Tugas PNS, persentase penyerapan 75,08 % dengan target kinerja 220 orang tercapai 295 orang, terdapat sisa lebih anggaran untuk diefisiensi tetapi target kinerja tercapai lebih karena untuk memenuhi kebutuhan pengisian formasi jabatan.
7. Pengelolaan Pensiun Pegawai, persentase penyerapan 78,17 % dengan target kinerja 150 SK tercapai 242 SK, terdapat sisa lebih anggaran untuk diefisiensi tetapi target kinerja melebihi sesuai dengan pengajuan dari OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, dalam menjalankan kegiatannya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi:

a. Organisasi

Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga memungkinkan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang ada.

c. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan masih perlu ditingkatkan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran.

d. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang belum tertampung.

e. Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD

Belum terbangunnya sinergitas, koordinasi antar SKPD sehingga diperlukan mekanisme kerja yang lebih tegas untuk mengatasi hal tersebut.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, ke depan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan fungsional maupun teknis maupun penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD melalui peraturan yang mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan *up to date* dan demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Penyajian evaluasi pelaksanaan Renja dapat terlihat dalam tabel T-C.29 berikut ini:

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BKPSDM DAN PENCAPAIAN RENJA BKPSDM S/D TAHUN 2020 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN PANGANDARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2021	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 0 7 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95	%					90		
5 0 7 0 1 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	Bulan	12	12	12	100,00%	12	36	100,00%
5 0 7 0 1 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6	Rekening	2	2	2	100,00%	2	6	100,00%
5 0 7 0 1 0 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3	Orang	1	1	1	100,00%	1	3	100,00%
5 0 7 0 1 1 0	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	6	Orang	2	2	2	100,00%	2	6	100,00%
5 0 7 0 1 1 1	Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga	6	Orang	2	2	2	100,00%	2	6	100,00%
5 0 7 0 1 1 2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3	Paket	1	1	1	100,00%	1	3	100,00%
5 0 7 0 1 1 3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9	Jenis	3	3	3	100,00%	3	9	100,00%
5 0 7 0 1 1 4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21	Jenis	7	7	7	100,00%	7	21	100,00%

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2021	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 0 7 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95	%					90		
5 0 7 0 1 1 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36	Bulan	12	12	12	100,00%	12	36	100,00%
5 0 7 0 1 1 7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36	Bulan	12	12	12	100,00%	12	36	100,00%
5 0 7 0 1 1 8	Penyediaan Makanan dan Minuman	6	Jenis	2	2	2	100,00%	2	6	100,00%
5 0 7 0 1 1 9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	465	Kali Perjalanan	100	145	82	56,55%	75	257	55,27%
5 0 7 0 1 2 3	Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi	3	Orang	1	1	1	100,00%	1	3	100,00%

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2021	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 5 0 7 0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	95	%					90		
5 0 7 0 2 0 7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3	Paket	1	1	1	100,00%	1	3	100,00%
5 0 8 0 2 0 9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2	Paket				0,00%	2	2	100,00%
5 0 7 0 2 1 0	Pengadaan Mebeleur	1	Paket	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
5 0 7 0 2 1 3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3	Gedung Kantor	1	1	1	100,00%	1	3	100,00%
5 0 7 0 2 1 5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	15	Kendaraan	5	5	5	100,00%	6	16	106,67%
5 0 7 0 2 1 9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3	Gedung Kantor	1	1	1	100,00%	1	3	100,00%
5 0 7 0 2 2 5	Pengadaan Komputer	18	Unit	4	2	2	100,00%	3	9	50,00%
5 0 7 0 2 3 0	Penyediaan Gedung Kantor	3	Gedung Kantor	1	1	1	100,00%	1	3	100,00%

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

5	0	7	0	6	0		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	Orang										
5	0	7	0	5	0	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	Orang	4	-	-	0,00%	-	4	0,00%			
5	0	7	0	6			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	32	Laporan					6					
5	0	7	0	6	0	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	2	2	2	100,00%	2	6	100,00%			
5	0	7	0	6	0	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3	Laporan	1	1	1	100,00%	1	3	100,00%			
5	0	7	0	6	0	4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3	Laporan	1	1	1	100,00%	1	3	100,00%			
5	0	7	0	6	0	5	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	6	Dokumen	2	2	2	100,00%	2	6	100,00%			
5	0	7	0	6	0	6	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	3	Sistem	1	1	1	100,00%	1	3	100,00%			
5	0	7	0	6	0	7	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	3	Sistem	1	1	1	100,00%	1	3	100,00%			

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2021	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 0 7 0 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	32	Laporan					6		
5 0 7 0 6 1 4	Penyusunan Renstra SKPD	1	Laporan	1			0,00%		1	100,00%
5 0 7 2 9	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100	%							
5 0 7 2 9 2 5	Pemindahan Tugas PNS	660	Orang	47	220	292	132,73%	150	489	74,09%
5 0 7 2 9 2 6	Pengelolaan Pensiun Pegawai	450	SK	182	150	242	161,33%	260	684	152,00%
5 0 7 2 9 0 1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	14	Dokumen	3	3	3	100,00%	1	7	50,00%
5 0 7 2 9 0 4	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	1500	SK	536	500	647	129,40%	500	1.683	112,20%
5 0 7 2 9 2 7	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	3	Sistem	1	1	1	100,00%	1	3	100,00%
5 0 7 2 9 0 9	Proses Penanganan Kasus- kasus Pelanggaran Disiplin PNS	30	SK	6	15	-	0,00%	15	21	70,00%

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2021	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 0 7 2 9 1 9	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100	%							
5 0 7 2 9 1 9	Penyusunan Formasi PNS	3	Dokumen	1	1	1	100,00%	1	3	100,00%
5 0 7 2 9 2 0	Pengadaan Pegawai	1210	Orang	427	350	306	87,43%	270	1.003	82,89%
5 0 7 2 9 2 2	Pelantikan Jabatan	600	Orang	103	300	363	121,00%	200	666	111,00%
5 0 7 2 9 2 9	Pengangkatan CPNS ke PNS	1147	SK	47	447	-	0,00%	430	477	41,59%
5 0 7 2 9 1 8	Pembangunan/Pengembangan Sistem E-Remunerasi Kinerja	3	Sistem	-	1	1	100,00%	1	2	66,67%
5 0 7 2 9 3 1	Inventarisasi dan Fasilitasi Data LHKASN	3	Dokumen	-	1	1	100,00%	1	2	66,67%
5 0 7 2 9 3 3	Disiplin Pegawai	36	Laporan	-	12	12	100,00%	12	24	66,67%
7 0 1 2 9 3 2	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	3	Paket	-	1	1	100,00%	1	2	66,67%

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2021	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5070607	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kabupaten Pangandaran	1488	Orang							
5071505	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	520	Orang	47	430	430	100,00%	1	478	91,92%
5071517	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	421	Orang	49	60	60	100,00%	-	109	25,89%
5071518	Pendidikan Penjurangan Struktural	27	Orang	10	7	7	100,00%	15	32	118,52%
5071515	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	90	Orang	10	30	30	100,00%	-	-	0,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sebagai daerah otonomi baru maka bentuk Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran masih perlu dibenahi, asas desentralisasi perlu disikapi secara arip dan bijaksana, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut pengembangan kapasitas organisasi perangkat daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran bersamaan dengan pembentukan kelembagaan serta tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubag Program dan Keuangan
3. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier, membawahi :
 - Sub bidang Mutasi
 - Sub bidang Pengembangan Karier
 - Sub bidang Penilaian Kinerja Aparatur
4. Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan Informasi, membawahi :
 - Sub bidang Pengadaan dan Pemberhentian
 - Sub bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
 - Sub bidang Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN

Adapun tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun seluruh Target Capaian dan hasil pengukuran indikator kinerja dapat dilihat di tabel T-C.30 sebagai berikut ini:

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PANGANDARAN

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi	95,00%	90,00%	90,00%	95,00%	95,00%	89,00%	92,77%	93,00%	95,00%	
2	Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar Kuantitas dan Kualitas	95,00%	90,00%	90,00%	95,00%	95,00%	89,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
3	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun	32 Laporan	7	6	6	6	6	6	6	6	
4	Persentase cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%	97,17%	97,94%	98,00%	100,00%	93,32%	74,31%	80,00%	85,00%	
5	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan uji kompetensi	1684 Orang	160 Orang	188 Orang	650 Orang	650 Orang	112 Orang	16 Orang	290 Orang	350 Orang	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk mencapai tugas dan fungsi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menitikberatkan pada kegiatan pengelolaan administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran serta melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan SKPD.

- Terciptanya sinergitas antara proses politik, proses teknokratik dan proses partisipatif di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Terbentuknya iklim yang sehat dalam rangka tertib Administrasi, Akuntabilitas dan peningkatan kualitas capaian kinerja.
- Menjunjung tinggi Azas efektif, efisien dan transparansi.

Pemerintah daerah di tuntut selalu mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di berbagai bidang, dengan harapan mampu mengimbangi perkembangan zaman serta era globalisasi yang bergerak sangat cepat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk BKPSDM berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel T-C 31 berikut ini :

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	BKPSDM	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Cepat, Tepat dan Akurat	95%	535.268.910,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM		95%	6.176.238.438,00	
						Administrasi Umum	BKPSDM			2.849.325.660,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	Jumlah materai 6000 dan 3000 yang dikeluarkan	215 Materai	2.420.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	Jumlah materai 6000 dan 3000 yang dikeluarkan, Jumlah Sistem yang Dibnagun	416 Materai, 1 Sistem	98.998.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 Rekening	63.525.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 Rekening	66.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BKPSDM	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	1 Orang	20.328.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BKPSDM	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	1 Orang	17.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	BKPSDM	Jumlah jasa pengamanan kantor yang disediakan	2 Orang	40.656.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BKPSDM	Jumlah gedung kantor yang disediakan jasa pemeliharaannya	1 Gedung Kantor	34.800.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga	BKPSDM	Jumlah jasa penunjang kegiatan perkantoran dan rumah tangga yang disediakan	2 Orang	40.656.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	112.580.000,00	Kegiatan Administrasi Keuangan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKPSDM	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	1 Paket	83.744.100,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKPSDM	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	1 Paket	84.404.519,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	36.300.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	57.352.373,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Jumlah jenis alat listrik yang disediakan	7 Jenis	3.630.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Jumlah jenis alat listrik yang disediakan	7 Jenis	4.671.986,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM	Jumlah waktu yang disediakan untuk penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	6.050.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM	Jumlah waktu yang disediakan untuk penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	29.324.199,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM	Jumlah waktu yang disediakan untuk penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	24.200.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM	Jumlah waktu yang disediakan untuk penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	29.508.000,00	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	BKPSDM	Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	3 Jenis	12.173.810,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	BKPSDM	Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	3 Jenis	13.324.000,00	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	BKPSDM	Jumlah aktivitas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	170 Kali Perjalanan	175.450.000,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	BKPSDM	Jumlah aktivitas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	85 Kali Perjalanan	332.820.000,00	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi	BKPSDM	Jumlah jasa tenaga pengemudi yang disediakan	1 Orang	26.136.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	BKPSDM	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan	1 Orang	22.200.000,00	

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKPSDM	Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar Kuantitas dan Kualitas	95%	418.403.690,00						
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BKPSDM	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	12.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BKPSDM	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	947.661.053,00	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	1 Paket	27.500.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	1 Paket	408.688.825,00	
	Pengadaan Mebeleur	BKPSDM	Jumlah mebeleur yang Disediakan	4 Jenis	38.500.000,00	Pengadaan Mebeleur	BKPSDM	Jumlah mebeleur yang Disediakan	2 Jenis	38.667.545,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BKPSDM	Jumlah gedung kantor yang disediakan jasa pemeliharaannya	1 Gedung Kantor	4.235.000,00						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BKPSDM	Jumlah kendaraan yang disediakan Jasa Pemeliharaannya	3 Unit Kend. Roda 2 ; 3 Unit Kend. Roda 4	165.833.690,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BKPSDM	Jumlah kendaraan yang disediakan Jasa Pemeliharaannya	3 Unit Kend. Roda 2 ; 3 Unit Kend. Roda 4	197.865.160,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	BKPSDM	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan jasa pemeliharaannya	1 Gedung Kantor	16.500.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	BKPSDM	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan jasa pemeliharaannya	1 Gedung Kantor	16.490.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan jasa pemeliharaannya	1 Gedung Kantor	4.235.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan jasa pemeliharaannya	1 Gedung Kantor	5.970.000,00	
	Pengadaan Komputer	BKPSDM	Jumlah komputer yang disediakan	8 unit	77.000.000,00						
	Penyediaan Gedung Kantor	BKPSDM	Jumlah gedung kantor yang disediakan	1 Gedung Kantor	72.600.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah gedung kantor yang disediakan	1 Gedung Kantor	330.000.000,00	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKPSDM	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30 Orang	69.187.500,00						
						Peningkatan Disiplin dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKPSDM			76.650.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	BKPSDM	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30 Orang	69.187.500,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	BKPSDM	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30 Orang	76.650.000,00	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BKPSDM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun	6 Laporan	82.401.000,00						
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	2.662.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan		Kegiatan Administrasi Keuangan
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	BKPSDM	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Laporan	2.420.000,00						
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	BKPSDM	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	2.420.000,00						

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM			3.155.733.778,00	
	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD	2 Dokumen	27.225.000,00	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumentasi Perencanaan	BKPSDM	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD	2 Dokumen	21.000.000,00	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BKPSDM	Jumlah sistem informasi Keuangan Daerah yang Dikelola	1 Sistem	23.837.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BKPSDM	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Kantor yang Disediakan	1 Orang	21.000.000,00	Kegiatan Administrasi Umum
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	BKPSDM	Jumlah Sistem Informasi Barang Milik Daerah yang Dikelola	1 Sistem	23.837.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan		Kegiatan Administrasi Keuangan
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	1 Kantor	3.113.733.778,00	Kegiatan Administrasi Keuangan
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPSDM	Persentase cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100,00%	3.500.959.090,00	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM			5.382.124.500,00	
						Pengembangan Karir ASN	BKPSDM			943.640.000,00	
	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	BKPSDM	Jumlah dokumen penyusunan rencana pembinaan karir PNS	5 Dokumen	611.149.000,00	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	BKPSDM	Jumlah dokumen penyusunan rencana pembinaan karir PNS	1 Dokumen	943.640.000,00	
	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	BKPSDM	Jumlah SK kenaikan pangkat yang ditetapkan	500 SK	143.990.000,00	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	BKPSDM	Jumlah SK kenaikan pangkat yang ditetapkan	500 SK	344.709.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian
	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	BKPSDM	Jumlah SK penjatuhan hukuman disiplin	5 SK	19.965.000,00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah SK penjatuhan hukuman disiplin	8 SK	38.975.000,00	Kegiatan Pembinaan ASN
	Pembangunan/Pengembangan Sistem E-Remunerasi Kinerja	BKPSDM	Jumlah Sistem E-Remunerasi Kinerja yang dikelola	1 Sistem	150.500.000,00						
						Administrasi Kepegawaian	BKPSDM			1.837.369.000,00	
	Penyusunan Formasi PNS	BKPSDM	Jumlah dokumen formasi yang tersusun	1 Dokumen	39.688.000,00	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah dokumen formasi pegawai	1 Dokumen		
	Seleksi Penerimaan Calon PNS	BKPSDM	Jumlah CPNS yang diseleksi	560 Orang	1.196.855.000,00	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah dokumen formasi pegawai	1 Dokumen	1.401.672.000,00	
	Pelantikan Jabatan	BKPSDM	Jumlah pejabat yang dilantik	200 Orang	16.577.000,00	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	BKPSDM	Jumlah dokumen penyusunan rencana pembinaan karir PNS	1 Dokumen		Kegiatan Pengembangan Karir
	Pemindahan Tugas PNS	BKPSDM	Jumlah PNS Non Struktural yang ditempatkan sesuai kompetensi	220 Orang	29.040.000,00	Pemindahan Tugas PNS	BKPSDM	Jumlah PNS Non Struktural yang ditempatkan sesuai kompetensi	220 Orang	94.529.000,00	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Pengelolaan Pensiun Pegawai	BKPSDM	Jumlah SK pensiun yang ditetapkan	150 SK	61.105.000,00	Pengelolaan Pensiun Pegawai	BKPSDM	Jumlah SK pensiun yang ditetapkan	260 SK	90.988.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian
						Pengelolaan Data dan Informasi ASN	BKPSDM			175.964.000,00	
	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian Daerah yang dikelola	1 Sistem	86.031.000,00	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	BKPSDM	Jumlah Sistem yang dikembangkan	1 Sistem	119.008.000,00	
						Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Waktu yang Dikelola Sistem Informasi Kepegawaian	1 Tahun	56.956.000,00	

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengangkatan CPNS Ke PNS	BKPSDM	Jumlah SK PNS yang ditetapkan	350 SK	41.321.500,00						
						Peningkatan Kapasitas	BKPSDM			2.259.383.500,00	
	Inventarisasi dan Fasilitasi Data LHKASN	BKPSDM	Jumlah dokumen LHKASN	1 Dokumen	60.837.590,00	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	BKPSDM	Jumlah dokumen Penilaian Kinerja	1 Dokumen	230.434.000,00	
	Pemberian Bantuan Belajar dan Ikatan Dinas	BKPSDM	Jumlah penerima bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas	1 Paket	935.000.000,00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN penerima bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas	8 Orang	1.265.371.000,00	
	Disiplin Pegawai	BKPSDM	Jumlah Pegawai yang melaksanakan ketentuan jam kerja	2000 PNS	108.900.000,00	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah laporan pegawai yang melaksanakan ketentuan jam kerja	12 Laporan	126.793.000,00	Kegiatan Pembinaan ASN
						Fasilitasi Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah kartu yang diterbitkan bagi PNS daerah	750 Kartu	31.944.000,00	Kegiatan Peningkatan Kapasitas
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kabupaten Pangandaran	BKPSDM	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan uji kompetensi	650 Orang	5.322.663.500,00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM			7.472.739.000,00	
						Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				7.472.739.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Calon PNS Daerah	BKPSDM	Jumlah CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	200 orang	2.090.000.000,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah ASN Eselon II, III, dan IV yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Jumlah CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar	150 Orang dan 316 Orang	7.318.841.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Bagi Calon PNS Daerah	BKPSDM	Jumlah CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi	200 Orang	1.320.000.000,00						
	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	BKPSDM	Jumlah Aparatur yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	30 Orang	61.468.000,00						
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	BKPSDM	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi	200 Orang	1.540.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	BKPSDM	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi	170 Orang	731.634.500,00	Kegiatan Peningkatan Kapasitas
	Pendidikan Penjenjangan Struktural	BKPSDM	Jumlah aparatur eselon III, dan IV yang mengikuti diklat PIM tingkat III, dan IV	10 orang	286.995.500,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah ASN Eselon II, III, dan IV yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Jumlah CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar			
	Sertifikasi Kompetensi/Uji Kompetensi Pemerintahan	BKPSDM	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi/Uji Kompetensi Pemerintahan	10 Orang	24.200.000,00	Ppelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	BKPSDM	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi/Uji Kompetensi Pemerintahan	10 Orang	153.898.000,00	
TOTAL					9.928.883.690,00					19.031.101.938,00	



TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Program SKPD

Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi, dan Daerah Tahun 2021

HARMONISASI TUJUAN DAN SASARAN SKPD TERHADAP VISI DAN MISI			
NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN	SKPD
1	2	3	4
Misi Nasional : Misi 5. Mewujudkan Indonesia Yang Berdaya Saing (Reformasi Aparatur Negara) Kebijakan Nasional : Program 12. Menjalankan Refomasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (Meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi) NAWA CITA : Poin 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	Misi Jawa Barat : Misi 3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. (Menciptakan Pemerintahan yang bermutu, akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional dan sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good and Clean Governance</i>)). Strategi: Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah. Arah kebijakan: - Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi - Meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja. Kegiatan Prioritas : <i>Common Goals</i> No 10. Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan IPTEK. (Modernisasi pemerintahan dan profesionalisme aparatur)	Misi RPJPD Kabupaten Pangandaran : Misi 1: Menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan bersih Misi RPJMD Kabupaten Pangandaran : Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Bersih dan Melayani. (mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)). Prioritas Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018: Poin 4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Tata kelola Pemerintah Berbasis TIK Arah Kebijakan Pembangunan Kab. Pangandaran Tahun 2018: Poin 4. Mengoptimalkan Implementasi Reformasi Birokrasi Kebijakan Kabupaten Pangandaran: Isu Strategis Jangka Panjang: Minimnya Kuantitas dan Kualitas SDM Aparatur Isu Strategis Jangka Menengah: Kurangnya Pemberdayaan Masarakat dan Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM	Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Sasaran RPJMD: Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Sasaran Strategis SKPD : Meningkatkan Profesionalisme ASN

Misi Kabupaten Pangandaran 2016 – 2021 yang terkait dengan tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

Misi 1 : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani”.

Dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dituntut untuk dapat mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Melalui beberapa program, kegiatan dan penerapan peraturan kepegawaian, kegiatan pembinaan serta diklat pegawai sebisa mungkin dapat mewujudkan aparatur pemerintahan yang efektif, bersih dan baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang optimal serta penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

Sedangkan prioritas program pada analisis isu-isu strategis RPJMD yang terkait langsung dengan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran yaitu kurangnya pemberdayaan masyarakat dan kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkaitan erat dengan misi Provinsi yaitu:

Misi 3 : “Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik.”

Dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus mampu menciptakan pemerintahan yang bermutu, akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional dan sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*). Dengan strategi meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, sedangkan arah kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi;
- Meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja.

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sejalan pula dengan misi Nasional yaitu misi 5 : ‘Mewujudkan Indonesia Yang Berdaya Saing.’ Hal ini dimaksudkan harus adanya Reformasi Aparatur Negara, seperti tercantum dalam program Nasional yaitu Program 12. “Menjalankan Refomasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.” Dengan demikian maka integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi akan terwujud. Seiring sejalan dengan NAWA CITA pada Poin 2 yaitu “Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.”

Dalam melaksanakan program kegiatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Sumber daya anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Pangandaran.
2. Sarana Prasarana Kepegawaian.
3. Sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan administrasi kepegawaian.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pelayanan kepegawaian, yaitu :

1. Tidak semua SDM Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki kemampuan IT
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang kurang memadai
3. Kurangnya pemahaman semua aparatur terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian
4. Masih ada beberapa aparatur pemerintah yang penempatannya belum sesuai dengan disiplin ilmunya
5. Posisi jabatan struktural dan fungsional PNS yang masih belum terisi
6. Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Pangandaran belum secara otomatis dan masih ada yang terlambat kenaikan pangkatnya terutama bagi tenaga fungsional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran Renstra dan arah pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 merupakan pedoman program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran tahun 2020. Dokumen Renja disusun ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang lebih detail dalam Program Prioritas dan Kegiatan Tahun 2020 yang kemudian dituangkan dalam DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran.

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran dalam pembangunan, pengembangan dan penjabarannya adalah sebagai berikut :

Tujuan	:	Mewujudkan Reformasi Birokrasi
Sasaran	:	Meningkatnya Profesionalisme ASN
Indikator Sasaran	:	Indeks Profesionalitas ASN

Maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Adanya pernyataan kegiatan diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu Rencana Kerja suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan adalah Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021 beserta prognosisnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN PANGANDARAN

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	3	1		Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan			Rp 11.558.362.938,00				Rp 13.292.117.378,70
5	3			Kepegawaian			Rp 6.176.238.438,00				Rp 7.102.674.203,70
5	3	1		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah			Rp 21.000.000,00	APBD			Rp 24.150.000,00
5	3	1	2.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 21.000.000,00	APBD			Rp 24.150.000,00
5	3	1	2.1.2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD	BKPSDM	2 Dokumen	Rp 21.000.000,00	APBD	2 Dokumen	Rp 24.150.000,00
5	3	1	2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 3.226.313.778,00	APBD			Rp 3.710.260.844,70
5	3	1	2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	BKPSDM	1 Kantor	Rp 3.123.733.778,00	APBD	1 Kantor	Rp 3.580.793.844,70
5	3	1	2.2.6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BKPSDM	12 Laporan	Rp 112.580.000,00	APBD	12 Laporan	Rp 129.467.000,00
5	3	1	2.3	Administrasi Umum			Rp 2.757.745.660,00	APBD			Rp 3.171.407.509,00
5	3	1	2.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materiail 6000 dan 3000 yang Dikeluarkan, dan Jumlah Sistem yang Dibangun	BKPSDM	416 Materiail, 1 Sistem	Rp 98.998.000,00	APBD	416 Materiail, 1 Sistem	Rp 113.847.700,00
5	3	1	2.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	BKPSDM	2 Rekening	Rp 66.600.000,00	APBD	2 Rekening	Rp 76.590.000,00
5	3	1	2.3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah gedung kantor yang disediakan	BKPSDM	1 Gedung Kantor	Rp 330.000.000,00	APBD	1 Gedung Kantor	Rp 379.500.000,00
5	3	1	2.3.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan	BKPSDM	1 Orang	Rp 22.200.000,00	APBD	1 Orang	Rp 25.530.000,00
5	3	1	2.3.7	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Orang	Rp 21.000.000,00	APBD	1 Orang	Rp 24.150.000,00
5	3	1	2.3.8	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Orang	Rp 17.400.000,00	APBD	1 Orang	Rp 20.010.000,00
5	3	1	2.3.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	BKPSDM	1 Paket	Rp 84.404.519,00	APBD	1 Paket	Rp 97.065.196,85
5	3	1	2.3.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	BKPSDM	3 Jenis	Rp 57.352.373,00	APBD	3 Jenis	Rp 65.955.228,95
5	3	1	2.3.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik yang disediakan	BKPSDM	7 Jenis	Rp 4.671.986,00	APBD	7 Jenis	Rp 5.372.783,90
5	3	1	2.3.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah waktu yang disediakan untuk penyediaan peralatan rumah tangga	BKPSDM	12 Bulan	Rp 29.324.199,00	APBD	12 Bulan	Rp 33.722.828,85
5	3	1	2.3.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu yang disediakan untuk penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM	12 Bulan	Rp 29.508.000,00	APBD	12 Bulan	Rp 33.934.200,00
5	3	1	2.3.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	BKPSDM	3 Jenis	Rp 13.324.000,00	APBD	3 Jenis	Rp 15.322.600,00
5	3	1	2.3.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktivitas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	BKPSDM	85 Kali Perjalanan	Rp 332.820.000,00	APBD	85 Kali Perjalanan	Rp 382.743.000,00
5	3	1	2.3.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	BKPSDM	1 Paket	Rp 947.661.053,00	APBD	1 Paket	Rp 1.089.810.210,95
5	3	1	2.3.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	BKPSDM	1 Paket	Rp 408.688.825,00	APBD	1 Paket	Rp 469.992.148,75
5	3	1	2.3.25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang disediakan	BKPSDM	2 Jenis	Rp 38.667.545,00	APBD	1 Paket	Rp 44.467.676,75
5	3	1	2.3.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang disediakan jasa pemeliharaannya	BKPSDM	1 Gedung Kantor	Rp 34.800.000,00	APBD	1 Gedung Kantor	Rp 40.020.000,00
5	3	1	2.3.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumah kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaannya	BKPSDM	6 Unit	Rp 197.865.160,00	APBD	6 Unit	Rp 227.544.934,00
5	3	1	2.3.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan jasa pemeliharaannya	BKPSDM	1 Gedung Kantor	Rp 16.490.000,00	APBD	1 Gedung Kantor	Rp 18.963.500,00
5	3	1	2.3.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan jasa pemeliharaannya	BKPSDM	1 Gedung Kantor	Rp 5.970.000,00	APBD	1 Gedung Kantor	Rp 6.865.500,00
5	3	1	2.4	Peningkatan Disiplin dan Fasilitas Sumber Daya Aparatur			Rp 171.179.000,00	APBD			Rp 196.855.850,00
5	3	1	2.4.8	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS Non Struktural yang ditempatkan sesuai kompetensi	BKPSDM	200 Orang	Rp 94.529.000,00	APBD	200 Orang	Rp 108.708.350,00
5	3	1	2.4.9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	BKPSDM	1 Kantor	Rp 76.650.000,00	APBD	1 Kantor	Rp 88.147.500,00
5	3	2		Program Kepegawaian Daerah			Rp 5.382.124.500,00				Rp 6.189.443.175,00
5	3	2	2.1	Pengelolaan Data dan Informasi ASN			Rp 175.964.000,00	APBD			Rp 202.358.600,00
5	3	1	2.1.1	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Jumlah Jumlah Sistem yang Terkelola	BKPSDM	1 Sistem	Rp 119.008.000,00	APBD	1 Sistem	Rp 136.859.200,00
5	3	1	2.1.3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah waktu yang dikelola sistem informasi Kepegawaian Daerah	BKPSDM	1 Tahun	Rp 56.956.000,00	APBD	1 Tahun	Rp 65.499.400,00
5	3	1	2.2	Administrasi Kepegawaian			Rp 1.837.369.000,00	APBD			Rp 2.112.974.350,00
5	3	2	2.2.1	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan Pegawai	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pengadaan Pegawai	BKPSDM	1 Dokumen	Rp 1.401.672.000,00	APBD	1 Dokumen	Rp 1.611.922.800,00
5	3	2	2.2.4	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian pensiun	Jumlah SK pensiun yang ditetapkan	BKPSDM	200 SK	Rp 90.988.000,00	APBD	200 SK	Rp 104.636.200,00
5	3	2	2.2.10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan pangkat yang ditetapkan	BKPSDM	500 SK	Rp 344.709.000,00	APBD	500 SK	Rp 396.415.350,00
5	3	2	2.3	Peningkatan Kapasitas			Rp 2.259.383.500,00	APBD			Rp 2.598.291.025,00
5	3	2	2.3.1	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi	BKPSDM	170 Orang	Rp 731.634.500,00	APBD	170 SK	Rp 841.379.675,00
5	3	2	2.3.2	Pengembangan Penilaian kinerja ASN	Jumlah dokumen Penilaian Kinerja	BKPSDM	1 Dokumen	Rp 230.434.000,00	APBD	1 Dokumen	Rp 264.999.100,00
5	3	2	2.3.5	Fasilitasi Profesi ASN	Jumlah kartu yang diterbitkan bagi PNS daerah	BKPSDM	500 Kartu	Rp 31.944.000,00	APBD	500 Kartu	Rp 36.735.600,00
5	3	2	2.3.7	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN penerima bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas	BKPSDM	8 Orang	Rp 1.265.371.000,00	APBD	8 Orang	Rp 1.455.176.650,00
5	3	2	2.4	Pengembangan Karir ASN			Rp 943.640.000,00	APBD			Rp 1.085.186.000,00
5	3	2	2.4.1	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jumlah dokumen Pengembangan Karier dan Promosi ASN	BKPSDM	1 Dokumen	Rp 943.640.000,00	APBD	1 Dokumen	Rp 1.085.186.000,00
5	3	2	2.5	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Rp 165.768.000,00	APBD			Rp 190.633.200,00
5	3	2	2.5.1	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah laporan pegawai yang melaksanakan ketentuan jam kerja	BKPSDM	12 Laporan	Rp 126.793.000,00	APBD	12 Laporan	Rp 145.811.950,00
5	3	2	2.5.2	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah SK penjatuhan hukuman disiplin	BKPSDM	8 SK	Rp 38.975.000,00	APBD	8 SK	Rp 44.821.250,00
5	4			Pendidikan dan Pelatihan			Rp 7.472.739.000,00				Rp 8.593.649.850,00
5	4	2		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			Rp 7.472.739.000,00				Rp 8.593.649.850,00
5	4	2	2.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			Rp 7.472.739.000,00	APBD			Rp 8.593.649.850,00
5	4	2	2.2.3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi/Uji Kompetensi Pemerintah	BKPSDM	10 Orang	Rp 153.898.000,00	APBD	10 Orang	Rp 176.982.700,00
5	4	2	2.2.7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN Eselon II dan III, yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Jumlah CPNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar	BKPSDM	150 Orang, 316 Orang	Rp 7.318.841.000,00	APBD	150 Orang, 316 Orang	Rp 8.416.667.150,00
JUMLAH							Rp 19.031.101.938,00				Rp 21.885.767.228,70



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran adalah **Program Tahunan** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran. Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran ini disusun

sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran.

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pangandaran. Program dan Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

1.1 Pengelolaan Data dan Informasi ASN

- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN dengan rencana anggaran sebesar Rp. 119.008.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah Sistem yang dikembangkan sebanyak 1 Sistem.
- Pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian dengan rencana anggaran sebesar Rp. 56.956.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah waktu yang dikelola Sistem Informasi Kepegawaian Daerah selama 1 tahun.

1.2 Administrasi Kepegawaian

- Penyusunan Analisis Kebutuhan, Informasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.401.672.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah Dokumen Formasi Pegawai sebanyak 1 Dokumen.
- Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun dengan rencana anggaran sebesar Rp. 90.998.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah SK Pensiun yang ditetapkan sebanyak 200 SK.
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sebesar Rp. 344.709.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah SK Kenikan pangkat yang ditetapkan sebanyak 500 SK.

1.3 Peningkatan Kapasitas ASN

- Peningkatan Kapasitas ASN dengan rencana anggaran sebesar Rp. 731.634.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi sebanyak 170 Orang.

- Pengembangan penilaian Kinerja ASN dengan rencana anggaran sebesar Rp. 230.434.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja sebanyak 1 Dokumen.
- Fasilitasi Profesi ASN dengan rencana anggaran sebesar Rp. 31.944.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah Kartu yang diterbitkan sebanyak 750 Kartu.
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.265.371.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah ASN Penerima bantuan beasiswa Tugas Belajar dan Ikatan Dinas sebanyak 8 Orang.

1.4 Pengembangan Karir ASN

- Pengembangan Karir dan Promosi ASN dengan rencana anggaran sebesar Rp. 943.640.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah Dokumen penyusunan rencana pembinaan karir PNS yang dikelola sebanyak 1 Dokumen.

1.5 Pembinaan ASN

- Pembinaan Disiplin ASN dengan rencana anggaran sebesar Rp. 126.793.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah Laporan pegawai yang melaksanakan ketentuan jam kerja sebanyak 12 Laporan.
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan rencana anggaran sebesar Rp. 38.975.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah SK Penjatuhan hukuman disiplin sebanyak 8 SK.

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pemindahan Tugas PNS dengan rencana anggaran sebesar Rp. 94.529.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah PNS non Struktural yang ditempatkan sesuai kompetensi sebanyak 200 Orang.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan rencana anggaran sebesar Rp. 153.898.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja

adalah Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi/Ujii Kompetensi Pemerintah sebanyak 10 Orang.

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 7.318.841.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah ASN Eselon II, III, dan IV yang mengikuti Diklat Kepemimpinan sebanyak 150 Orang, dan Jumlah CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar sebantak 316 Orang.



PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran merupakan Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif. Selanjutnya akan dijabarkan kedalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mengacu pada Visi dan Misi, Kabupaten Pangandaran sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh kepentingan yang menjadi media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan tahapan dalam melaksanakan Pembangunan. Kemudian akan dievaluasi dengan tujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang. Sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan Pembangunan.

Dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan komitmen para pemangku kepentingan, anggaran yang memadai dan kualitas kerja para penyelenggara serta derajat jaringan kerja yang dibangun. Oleh karena itu prinsip penata kelolaan yang baik (*good governance*) dan *clean governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, efektivitas dan efisiensi perlu dijunjung tinggi sebagai rambu-rambu bagi setiap penanggung jawab dalam pelaksana program dan kegiatan.

Kiranya Rencana Kerja ini dapat dijadikan acuan/pedoman di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran sehingga dapat berhasil guna, bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. HAMDANI, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19650417 199003 1 013